

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Abdul Rasyid Thalib .2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti
- Adami Chazali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta. Radja Grafindo Persada
- Akil Muchtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Andi Hamzah.1983. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sarana Pembangunan* . Makasar. Universitas Hasanudin
- 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Korupsi Nasional dan Internasional* . Jakarta.Raja Grafindo
- Arifin P. Soeria Atmadja. 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta. Gramedia
- Bachsan Mustafa . 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung . Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara
- Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
- Benveniste, Guy. 1997. *Birokrasi*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar maju . Cet. II
- Black, Henry Camble. *Black's Law Dictionary* . Sixth Edition . St. Paul Min . West Publising Co
- Bothlingk, F. R. 1954. *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*. Juridische Boekhandel en Uitgeverrij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage
- Bruggink,F. R (Barda Arief Sidharta penerjemah). 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti

- Curzon, L.B. 1997. *Criminal Law* . London . M7E Pitman Publising
- Cohen, Morris L. & Olson, Kent C.. 1992. *Legal Research*. St. Paul Minn: West Publishing Co
- Davis, Kennet Culp. 1972. *Adminisstative Law Text*. St Paul Minn. West Publising Co
- Dimock & Dimock . 1978. *Administrasi Negara*. Jakarta.Aksara Baru
- Dimyati Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta. Muhammadiyah University Press
- Dworkin, Ronald. (tanpa tahun). Police Discretion <https://www.essays24.com/Miscellaneous/Police-Discretion/11498.htm> , akses 27 Mei 2017
- Elwi Danil. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Fockema-Andrae (Saleh Adiwintas et al penerjemah). 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung. Binacipta
- F. Isjwara.1964. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung. Dwiwantara
- F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum* . Yogyakarta.CV. Ganda
- Hazewinkel-Suringga (Wirjono Prodjodikora). 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT.Refika Aditama
- Hikmahanto Juwana dalam Centurygate. 2010. *Mengurai Konspirari Penguasa dan Pengusaha*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara*, Buku I. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie.20016. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekjen Mahkamah Konstitusi
- . 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- (JSSP) Judicial Sector Support Program. 2016. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum . Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing

- Keeton . Page W et al. 1984. *Proses and Keeton on Tort*. ST.Paul Minnesota. USA
. West Publishing Co
- Kelsen, Hans (Jimly Asshiddiqie dkk penerjemah). 2006. *Teori Hukum Murni*.
Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- . (Raisul Muttagien penerjemah). 2010. *Teori Hukum Murni*. Nusa
Media
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta. Yayasan Obor
- Kranenburg . R & Vegting . W.G. 1901. *Inleiding in het Nederlandsche Taal* .
Amsterdam. Maatschappy. Elsevier
- . 1955. *Inleiding in het Nederlands administratiefrecht*. Yogyakarta.
Gajah Mada
- Kranenburg, R dan Tk. B. Sabaroedin. 1986. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta. PT.
Pradnya Paramita
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. Laporan Tahun KPK Tahun 2016
- Laica Marzuki. 26-31 Agustus 1996. *Peraturan Kebijaksanaan (bleidsregel)
Hakekat serta Funsinya Sarana Pemerintahan*. Makalah pada
Penataran Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara . Ujung
Pandang . Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2011
- . Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012
- , Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013
- , Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014
- , Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015
- , Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016
- Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi. 2012. *Perihal Negara . Hukum & Kebijakan
Publik*. Malang. Setara Press
- Logeman. 1954. *Ovez de Theorie van een Stelling Staatrecht*. Jakarta. Saksama
- Munir Fuaddy. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*.
PT.Citra Aditya Bakti
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Admnistrasi Negara*.
Jogyakarta. Liberty

- Maria Farida Indratri. 1996. *Ilmu Perundang-undang Dasar-Dasar Dan Pembentukannya (Bagian Pertama Dari Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan)*. Jakarta. Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1889. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Mac Iver. 2000. *The Web of Government*. dalam Moh.Kusnardi dan Bintan Siragih . *Ilmu Negara*. Jakarta. Gaya Media Pratama
- Miriam Budiardjo. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama
- M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Press
- Nata Saputra. 1988. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta. Rajawali
- Nur Basuki Minarno. 2008. *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laskbang Mediatama
- Philipus M. Hadjon (et al). 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- , 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Revisi. Surabaya. Peradaban
- .(tanpa tahun). *Tentang Wewenang*. Surabaya.Universitas Airlangga
- ,2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1983. *Kamus Bahasa Indonesia* . Depdikbud
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Predana Media Group
- Purwacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung. Citra Aditya
- R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika
- Roeslan Saleh. 1983. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* . cetakan pertama. Jakarta. Ghalia Indo
- Ridwan H .R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi* . Yogyakarta.FH UII Press

- Saldi Isra. 2009. *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas
- Sjachran Basah. 1989. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung. Alumni
- Syed Husen Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta. LP3ES
- Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan kekuasaan: kajian teoritis atas pidato Newaksara*. Jakarta. Gramedia
- Sunaryati Hartono. 1982. *Apakah The Rule Of Law itu*. Bandung. Alumni
- Soedirjo. 1984. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (sifat dan fungsi)*. Jakarta. Akademika Pressindo
- Stout, H.D. 1994. *De Betekenis van de Wet*. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle
- Sumadi Suryabarata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru
- Soetami, A. Siti. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan I. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- S.F. Marbun. dkk. 2004. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press
- Stoink., F.A.M dan Steembeek, J.G. 1985. *Inleiding in het staats en Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn. Samsom H.D Tjeenk Willink
- Ten Bergem J.B.J.M. 1996. *Besturen Door De Overheid*. W.E.J Tjeenk Willink. Deventer
- Tim Naskah Akademik RUU Tentang Organisasi Penegakan Hukum . 2010 . Laporan Akhir. BPHN
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Tonnaer, F.P.C.L. 1986. *Legaal besturen; het legaliteitsbeginsel . toetssteen of struikelblok?* . in: *Bestuur en norm* . Bundel opstellen opgedragen aan R. Crinice Le Roy . Deventer: Kluwer
- Van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet.28. Jakarta. PT. Pradnya Paramita

Wijayanto & Ridwan Zhucric. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia . sebab . akibat . dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Wilson, William . 2003. *Criminal Law . Doctrin and Theory*. London . Logman .

W.F. Prins dan R Kosim Adisapoetra. 1975. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Pradnya Paramita

W.F Prins.1978. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Pradnya Paramita

WJS Poewadarminta.1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik . gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta PT. RadjaGrafindo Persada

B. Jurnal/Disertasi/Pidato/Makalah

Addink, Henk & Berge, Gio Ten. 2007. *Innovation of Legal Means for Eliminating Corruption in The Public Service*. Electronic Journal of Comparative Law. vol. 11

Bagir Manan. 13 Mei 2000. *Wewenang Provinsi . Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Nasional. Bandung. Fakultas Hukum Unversitas Padjajaran

-----.(tanpa tahun) *Pengisian Jabatan Presiden Melalui (Dengan) Pemilihan Langsung*. makalah

-----.2011. *Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum*. naskah pidato . www.badilag.net . akses 1 Mai 2011

Chairul Huda . 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Bersumber Dari Hubungan Hukum Kontrak Dalam Bentuk Production Sharing Contrack (PSC) dan Cost Recovery* . chairul.drchairulhuda.blogspot.com

----- . Juni 2015. *Beberapa Isu Penting Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Terkait dengan Hukum Pidana Belanda*. <http://chairulhuda.blogspot.com>.

----- . 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Jakarta.Perdana Media

Chengzhi Yi. 15 April 2015. *Dan Hough (ed): corruption . anti-corruption and governance*. Crime Law Soc Change. Springer

Elwi Danil & Iwan Kurniawan. April 2017. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption* .Makasar. Halrev Volume 3 Issue

-----, 2001. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. (Disertasi). Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hikmawanto Juwana. 2014. *Patutkah Pengambil Kebijakan Dipidana* . <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/media/49-patutkah-pengambil-kebijakan-dipidana> . akses tanggal 12 Mei 2014

-----, 2017. *Kebijakan Salah Tidak Dapat Dipidana* .<http://www.antaraneews.com/print/171280/hikmahanto-kebijakan-salah-tidak-dapat-dipidana>. akses 30 April 2017

-----, Juni 2004. *Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia Gagasan dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional Volume II*, Jakarta. Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Indriyanto Seno Adji. Oktober 2007. *Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 25 Nomor 4

-----, Feberuari 2014. *Administrative Penal Law : Kearah Konstruksi Pidana Limitatif*. makalah dalam Pelatihan Pidana & Kriminologi. di The Rich Hotel Yogyakarta

-----, 2014. [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12470/bila-paraprofesor-pidana-berdebat-soal-korupsi-pejabat-negara) . <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12470/bila-paraprofesor-pidana-berdebat-soal-korupsi-pejabat-negara> . akses 14 April 2014

Jain, Arvin K. 2001. *Corruption A Review*. Concordia University. Journal of Ecomics Survei Vol.15 Nomor I

Jimly Asshiddiqie. (tanpa tahun). *Penegakan Hukum* . Makalah . http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf . akses 2 Februari 2017

Kejaksaan Agung Republik Indonesia . Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Atas Nama Terpidana Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra . <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?id=131> . akses 1 April 2017

Khanna, Jyoti & Johnston, Michael. 2007. *India's middlemen: connecting by corrupting?*. Springer

- Lennerfors, Thomas Taro. 2007. *The Transformation of Transparency – On the Act on Public Procurement and the Right to Appeal in the Context of the War on Corruption*. Journal of Business Ethics
- Lessig, Lawrence. 15 Maret 2013. Edmond J. Safra Center for Ethics. Working Papers . Nomor 1 . Harvard University
- Marcus Lukman. 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi*. disertasi. Bandung, Universitas Padjajaran
- Marwan Effendi. 11 Mei 2010. *Apakah Suatu Kebijakan Dapat Dikriminalisasi (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)*. Jakarta. Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
- Marwan Mas. 2005. *Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi . Suatu Kajian Sosio-Yuridis*. Makasar. Disertasi Program S.3 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanudin
- Muhammad Sahlan. 2016. *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Arena Hukum . Volume 9 Nomor 2
- OC. Kaligis. (tanpa tahun). *Korupsi Sebagai Tindak Kriminal Yang harus Diberantas: karakter dan Praktek Hukum di Indonesia* . <http://www.garuda.dikti.go.id>
- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi hasil keputusan rapat paripurna DPR Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2010
- Ponorica, Andreea Gabriela & Zaqeer, Latfe Jabar. 2015. *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries - Iraq Case Study* . Supplement 3. Vol. 16 .ebSCO
- Quah, Jon S.T, 1988, *Corruption in Asia With Special Reference To Singapore Patterns And Consequences*, Asian Journal of Public Administration Volume 10, 1988 - Issue 1
- Saldi Isra . *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam sisten Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi . Universitas Gadjah Mada
- Shaheydar, Abdolkarim., Navaseri, Morteza . 2016 . *Administrative corruption in Iran's legal system and ways of its correction* . Journal Of Current Research in Science

- Sjachran Basah. 24 September 1986. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXXIX Unpad
- Sudhono Iswahyudi. 2011. *Ambiguitas dan Tafsir Ideal Dalam Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Ringkasan . Disertasi. Online.eprints.undip.ac.id/40828/1/a._8._Ringkasan_Disertasi.pdf
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2010. https://soetandyo.files.wordpress.com/2010/09/teori_hukum_soetandyo.pdf . akses 14 Maret 2017
- Wallander, Lisa and Molander, Anders . 2014. *Disentangling Professional Discretion: A Conceptual and Methodological Approach* . Professions & Professionalism Volume 4. No 3
- Walton, Grant W. 2013. *The limitations of neoliberal logic in the anti-corruption industry: Lessons from Papua New Guinea*. Crime Law Soc Change
- Winahyu Erwiningsih. 2004. *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum* . Jurisprudence . Vol. 1 . Nomor 2
- Wuri Adriyani. 2010. Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik dan Hukum Privat. disertasi. Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga . <https://gagasanhukum.wordpress.com/?s=Wuri+Adriyan> . ISSN-1979-9397 . akses 14 Februari 2016
- Yahya, Khaireya R. and Gomaa, Salwa S.. 2016. *Evaluation of Anti-Administrative Corruption Policies in Palestine: Case Study of the Palestinian Ministry of Finance (2004-2013)*. The Social Sciences
- Yang ,Yang. 2012. *Fundamental Research on the Administrative Discretion Standard*. Beijing Law Review. 2012 . 3
- Yusron. 2017. *Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintahan Pada Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang*. Surabaya. Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1973

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption, 2003

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation
Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisir)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958

peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1340 K/Pid/1992

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 366 K/Pid /2000

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 PK/Pid/2001

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1696 K/Pid/2002

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1900 K/Pid/2002

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572 K/PID/2003

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 103 K/Pid/2007

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 K/PID.SUS/2008

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1902K/Pid/SUS/2008

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 779.K/Pid.Sus/2008

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 PK/PID.SUS/2009

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2011 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1875K/PID.SUS/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 19/Pid .B /2010 /PN.PDG.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20/Pid.B/TPK/2011/PN PDG

putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 204/Pid.B/2006/PN.PDG

E. Website/Daring

bali.bisnis.com . PNS Di Kupang Enggan Jadi Panitia Lelang . Takut Jadi Target Operasi . akses tanggal 13 Januari 2016

Berita Sore Online . *KPK Dinilai Tak Pahami Aspek Hukum Administrasi Negara* . diakses 16 Mei 2007

Erman Rajagukguk . hukumonline.com . 9 Maret 2014 . akses 13 Mei 2014

Jawa Pos . 28 Juli 2006

Katadata.com, *Lima Instruksi Jokowi Terkait Larangan Kriminalisasi Pejabat*

Kompas.com, <http://nasional.kompas.com>, *Kumpulkan Kapolda dan Kajati . Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah* . kompas.com . akses 26 Maret 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia . www.kbbi.net

Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) . <http://kbbi.web.id/>

KBBI Daring . <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Legal-Dictionary. <http://dictionary.law.com> . akses 16 January 2017

Rudi Satriyo.14 April 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12470/bila-para-profesor-pidana-berdebat-soal-korupsi-pejabat-negara> . akses 14 April 2014

Sofyan Djilil . <http://finance.detik.com> . 26 Mei 2015

Tri Agung Kristanto. Harian Kompas 12 Desember 2008

Transparency International. 2016. *Corruption Perceptions Index 2016* . https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016